



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/257/AA.05/2017 Tanggal 26 Januari 2015, Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 yang memuat rekomendasi agar lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, dengan cara melakukan perubahan dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama agar lebih relevan, spesifik dan terukur sesuai dengan arah tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur indikator kinerja utama sebagai alat ukur dan menjadi pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 39);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen yang khususnya membandingkan tingkat kinerja yang mencapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
7. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah pada masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
14. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari satu program yang merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
15. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
16. Indikator Kinerja Utama (*key performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan Organisasi dalam mencapai suatu sasaran strategis.
17. Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang yang selanjutnya disebut IKU Kota adalah IKU yang disusun oleh tim dan ditetapkan oleh Walikota Singkawang.
18. Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah IKU yang disusun oleh perangkat daerah dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.

19. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Daerah/ perangkat daerah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu yang telah direncanakan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENETAPAN IKU

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU di lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang adalah:

- a. untuk memperoleh informasi yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan benar; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Ruang lingkup penetapan IKU adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang selaku organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang wajib menyusun dan menetapkan IKU.
- (2) IKU pada tingkatan perangkat daerah meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) serta merupakan komitmen ukuran pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan kinerja perangkat daerah yang disusun dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.
- (3) IKU pada tingkat Pemerintah Daerah merupakan indikator pengukur yang dapat mencerminkan keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kota sesuai dengan sasaran strategis pada

rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. keselarasan indikator antar tingkatan unit organisasi, sejalan dan selaras dengan indikator tingkat Pemerintah Kota;
 - b. dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang dianggap masih relevan;
 - c. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
 - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - e. kebutuhan data statistik pemerintah Kota; dan
 - f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan memadai guna pengukuran kinerja suatu perangkat daerah dan memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan suatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB IV

PENGGUNAAN, PENERAPAN DAN RIVIU IKU

Pasal 5

- (1) Sebagai alat pengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah maka ditetapkan IKU Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat daerah dalam penerapan IKU perangkat daerah agar searah dan selaras dengan IKU Kota.
- (3) Perangkat daerah penanggung jawab IKU Kota sebagaimana tercantum dalam lajur empat Lampiran Peraturan Walikota ini selaku perangkat daerah pengampu tugas berkewajiban menghimpun, mengolah, dan melaporkan pencapaian IKU Kota yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Penerapan IKU pada tingkat perangkat daerah ataupun tingkat Kota harus diriviu secara berkala dalam 2 (dua) tahun sekali untuk mengetahui tingkat relevansi dan efektifitas IKU terhadap tujuan sasaran pemerintah.
- (2) Riviui IKU untuk tujuan tertentu dapat dilakukan terhadap hal:
 - a. tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh tim Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. terdapat perubahan arah kebijakan pemerintah Kota dalam menentukan arah pembangunan; dan
 - c. terdapat perubahan program dan kegiatan yang secara output dan outcome sebagai pendukung capaian IKU.
- (3) Riviui IKU Kota dan perangkat daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota dari unsur Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah dan perangkat daerah lainnya yang secara langsung berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

BAB V

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Koordinasi dan pengembangan dalam penetapan IKU dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta dibantu oleh Kepala PERANGKAT DAERAH dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 Juli 2017

WALIKOTA SINGKAWANG,

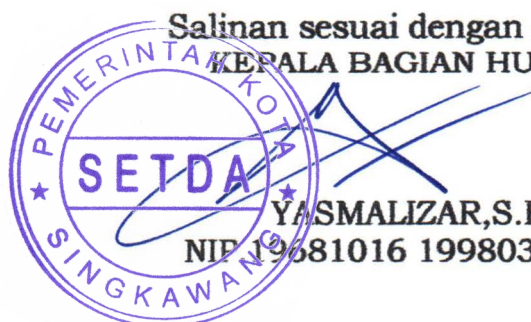
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 11 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd
SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

YASMALIZAR, S.H
NIP. 19681016 199803 1 004

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya masyarakat yang sehat mental dan spiritual	1 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Sekretariat Daerah (Kesra)	Sekretariat Daerah (Kesra)	$\frac{\text{Jumlah tempat ibadah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$
		2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan KB	Badan Pusat Statistik	Hasil perhitungan dan publikasi data Badan Pusat Statistik
		3 Angka usia harapan hidup	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
2	Menurunnya angka konflik antar agama dan antar etnis	1 Persentase peningkatan jumlah forum komunikasi antar agama yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	$\frac{\text{Forum Komunikasi agama aktif tahun n} - \text{Forum Komunikasi agama aktif tahun n-1}}{\text{Forum Komunikasi agama aktif tahun n-1}} \times 100$
		2 Persentase peningkatan jumlah forum komunikasi antar etnis yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	$\frac{\text{Forum Komunikasi etnis aktif tahun n} - \text{Forum Komunikasi etnis aktif tahun n-1}}{\text{Forum Komunikasi etnis aktif tahun n-1}} \times 100$
3	Terwujudnya infrastruktur pendidikan yang berkualitas dalam meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan efisien bagi kesejahteraan hidup rakyat	1 Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid usia 7-12 tahun di SD/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100 \%$
		2 Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid usia 13-15 tahun di SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 13-15 tahun}} \times 100 \%$
		3 Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid usia 16-18 tahun di SMA/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100 \%$
		4 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{\text{Jumlah Sekolah SD/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun}} \times 1000$

1	2	3	4	5	6	
		5 Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Sekolah SMP/ sederajat ----- x 1000 Jumlah seluruh penduduk usia 13-15 tahun	
		6 Rasio guru terhadap murid SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Guru SD/ sederajat ----- x 1000 Jumlah Murid SD/ Sederajat	
		7 Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Guru SMP/ sederajat ----- x 1000 Jumlah Murid SMP/ Sederajat	
		8 Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Guru SMA/ sederajat ----- x 1000 Jumlah Murid SMA/ Sederajat	
		9 Kualitas guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV ----- x 100% Jumlah guru pada jenjang SD/MI	
		10 Kualitas guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV ----- x 100% Jumlah guru pada jenjang SMP/MTs	
		11 Kualitas guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV ----- x 100% Jumlah guru pada jenjang SMA/MA/SMK	
		12 Angka Kelulusan SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Lulusan pada jenjang SD/MI ----- x 100% Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	
		13 Angka Kelulusan SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Lulusan pada jenjang SMP/MTs ----- x 100% Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	
		14 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Lulusan pada jenjang SMA/MA/SMK ----- x 100% Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/MA/SMK pada tahun ajaran sebelumnya	
		4 Terwujudnya infrastruktur kesehatan yang berkualitas dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat	1 Rasio posyandu per satuan balita	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Posyandu ----- x 1000 Jumlah Balita
			2 Rasio puskesmas, poliklinik, postu per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Puskesmas, poliklinik dan Postu ----- x 1000 Jumlah penduduk
			3 Rasio rumah sakit per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Rumah Sakit ----- x 1000 Jumlah penduduk
			4 Rasio dokter per satuan penduduk	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokter ----- x 1000 Jumlah penduduk
5 Rasio paramedis per satuan penduduk	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Paramedis ----- x 1000 Jumlah penduduk		
5 Terwujudnya infrastruktur pasar yang berkualitas dalam mendukung tercapainya Kota Singkawang sebagai pusat perdagangan	1 Persentase kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Nilai PDRB dari Perdagangan ----- x 100% Jumlah Total PDRB		
	2 Persentase prasarana dan sarana bangunan pasar tradisional dalam kondisi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Jumlah sapras bangunan pasar tradisional dalam kondisi baik ----- x 100% Jumlah total sapras bangunan tradisional		
6 Tercapainya cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota	1 Persentase air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Air Baku yang dapat dihasilkan dalam sehari ----- x 100% Kebutuhan air minimal sehari		
	2 Rumah tangga pengguna air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Pemukiman dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Pemukiman dan	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih ----- x 100% Jumlah Rumah Tangga		

1	2	3	4	5	6
7 9	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas dalam mewujudkan Kota Singkawang sebagai pusat jasa, perdagangan, dan agroindustri	1 Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan kondisi baik ----- Panjang keseluruhan jalan
		2 Rasio jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang saluran irigasi ----- Luas lahan budidaya pertanian
		3 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah ----- x 1000 Jumlah penduduk
		4 Persentase panjang jalan Kota dalam kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik ----- x 100% Panjang seluruh Jalan Kota
		5 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang Jalan Kota yang memiliki trotoar dan drainase ----- x 100% Panjang seluruh Jalan Kota
		6 Persentase jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang jalan di pusat kota ----- x 100% panjang jalan seluruh kota
		7 Jumlah penginapan / hotel	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Jumlah penginapan atau hotel yang ada di Kota Singkawang pada tahun n
		8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan	Panjang keseluruhan jalan ----- Jumlah kendaraan di Kota Singkawang
8	Terciptanya ekosistem yang kondusif bagi pengembangan produk-produk unggulan daerah berlandaskan ekonomi kerakyatan	1 Nilai produktifitas total daerah	BAPPEDA Kota Singkawang	BAPPEDA Kota Singkawang	Nilai total produktifitas daerah pada tahun n menurut perhitungan BPS yang Proyeksikan BAPPEDA Kota Singkawang
		2 Persentase koperasi aktif	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Jumlah koperasi aktif tahun n ----- x 100% Jumlah Koperasi keseluruhan tahun n
		3 Jumlah UKM non BPR/ LKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Jumlah UKM non BPR/LKM di Kota Singkawang Tahun n
		4 Jumlah BPR/ LKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Jumlah BPR/LKM di Kota Singkawang Tahun n
		5 Jumlah usaha mikro dan kecil	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Jumlah usaha mikro dan kecil Tahun n
9	Terwujudnya akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan tanpa mengesampingkan aspek pemerataan yang berkeadilan	1 Nilai Pertumbuhan PDRB	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Badan Pusat Statistik	Nilai total PDRB Kota Singkawang pada Tahun n berdasarkan data BPS yang diproyeksikan oleh BAPPEDA Kota Singkawang
		2 Laju inflasi	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)	Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)	Nilai Implasi Daerah pada tahun n berdasarkan data BPS, Bagian Perekonomian dan TPID
10	Terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat	1 Angka Kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka Kemiskinan pada Tahun n berdasarkan data BPS dan BAPPEDA
		2 PDRB Per kapita	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM,	Badan Pusat Statistik	Data PDRB per kapita proyeksi BAPPEDA Kota Singkawang
		3 Persentase balita gizi buruk	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Balita Gizi buruk ----- x 100% Jumlah balita
11	Terciptanya perbaikan struktur perekonomian daerah yang kokoh sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas (inklusif), berdaya saing global dan menjadi motor penggerak perekonomian	1 Persentase kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai PDRB dari Pertanian ----- x 100% Jumlah Total PDRB
		2 Persentase kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai PDRB dari Tanaman Pangan ----- x 100% Jumlah Total PDRB
		3 Persentase kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai PDRB dari Perkebunan ----- x 100% Jumlah Total PDRB

1	2	3	4	5	6	
		4	Jumlah produksi perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Jumlah produksi dari sektor perikanan baik tangkap dan budidaya
		5	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	$\frac{\text{Nilai PDRB dari Pariwisata}}{\text{Jumlah Total PDRB}} \times 100\%$
12	Terciptanya lingkungan kota yang nyaman dan bebas polusi secara berkelanjutan	1	Persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas wilayah ber HPL/HGB}} \times 100\%$
		2	Persentase penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Volume sampah yang dapat diangkut (m3)}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100\%$
		3	Rasio luas wilayah perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	$\frac{\text{Luas wilayah pusat kota}}{\text{Luas Kota Singkawang keseluruhan}} \times 1000$
13	Menurunnya kemungkinan terjadinya bencana alam akibat kegagalan perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah secara tepat sasaran, terukur, terarah dan berwawasan lingkungan berkelanjutan	1	Persentase pencemaran status mutu air	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah kawasan pemukiman/industri dan sumber mata air yang terpantau mutu airnya}}{\text{Jumlah kawasan pemukiman/industri dan sumber Mata air}} \times 100\%$
		2	Persentase cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata air}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan Sumber Mata air}} \times 100\%$
		3	Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan wajib amdal yang diawasi}}{\text{Jumlah seluruh Perusahaan wajib amdal}} \times 100\%$
14	Meningkatkan daya saing daerah demi percepatan ketangguhan dan ketahanan kota (Resilient City)	1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Tenaga kerja yang mendapat pelatihan}}{\text{Jumlah tenaga kerja terdaftar}} \times 100\%$

1	2	3	4	5	6
		2 Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	$\frac{\text{Angkatan kerja usia 15 tahun keatas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$
15	Terciptanya rasa aman masyarakat dan dunia usaha	1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	$\frac{\text{Jumlah Polisi Pamong Praja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
		2 Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	$\frac{\text{Jumlah Perlindungan Masyarakat (Linmas)}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$
		3 Persentase cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran perda}} \times 100\%$
		4 Persentase cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja	$\frac{\text{Banyaknya Kelompok Patroli} \times 3 \text{ Kali Patroli 1 hari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$
16	Meningkatnya stabilitas daerah guna menunjang aktifitas perekonomian masyarakat khususnya dunia investasi dan	1 Jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim Usaha
		2 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	Jumlah macam pajak dan retribusi yang ada di Kota Singkawang
		3 Persentase penguatan cadangan pangan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan Kota}}{100 \text{ Ton}} \times 100\%$
17	Menjadikan Kota Singkawang sebagai daerah tujuan wisata yang inovatif, menarik dan tetap bermartabat	1 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya selama 1 tahun
		2 Jumlah misi kesenian	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Jumlah misi kesenian yang dilakukan dalam 1 tahun
		3 Jumlah gedung kesenian	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Jumlah gedung kesenian yang ada di Kota Singkawang
		4 Jumlah kunjungan wisata	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara dalam 1 tahun
18	Meningkatnya prestasi olahraga Kota Singkawang yang kompetitif	1 Jumlah klub olahraga per 1000 penduduk	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	$\frac{\text{Jumlah klub olahraga di Kota Singkawang}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$
		2 Jumlah gedung olahraga per 1000 penduduk	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	$\frac{\text{Jumlah gedung olahraga di Kota Singkawang}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$
		3 Jumlah lapangan olahraga per 1000 penduduk	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan olah raga	$\frac{\text{Jumlah lapangan olahraga di Kota Singkawang}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$
19	Terwujudnya kesetiakawanan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Singkawang	1 Persentase PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial}} \times 100\%$
		2 Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat yang menerima jaminan sosial}}{\text{Jumlah penyandang cacat yang seharusnya menerima jaminan sosial}} \times 100\%$
20	Meningkatkan kinerja aparaturnya agar lebih profesional dan mengedepankan kinerja	1 Persentase penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran disiplin dan etika PNS tahun n} - \text{Jumlah Pelanggaran disiplin dan etika PNS tahun n-1}}{\text{Jumlah Pelanggaran disiplin dan etika PNS tahun n-1}} \times 100\%$
		2 Persentase diklat fungsional yang diselenggarakan Pemerintah Kota untuk meningkatkan kompetensi aparaturnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	$\frac{\text{Jumlah diklat fungsional yang diselenggarakan}}{\text{Jumlah diklat fungsional yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100\%$
21	Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintahan yang baik, benar, inovatif dan akuntabel	1 Nilai hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada tahun	Sekretariat Daerah (Organisasi)	Sekretariat Daerah (Organisasi)	Nilai dan predikat hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun n oleh tim kementerian PAN-RB
		2 Opini BPK terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat Kota	Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat Kota	Opini BPK pada hasil audit terhadap laporan pengelolaan keuangan daerah pada tahun n

1	2	3	4	5	6	
22	Terciptanya peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar dan pelayanan pendukung	1	Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja pelayanan masyarakat bidang pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat Kota	$\frac{\text{Jumlah keluhan/Aduan pada tahun n} - \text{jumlah keluhan/aduan n-1}}{\text{jumlah keluhan/aduan n-1}} \times 100\%$
		2	Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja pelayanan masyarakat bidang kesehatan	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Inspektorat Kota	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Inspektorat Kota	$\frac{\text{Jumlah keluhan/Aduan pada tahun n} - \text{jumlah keluhan/aduan n-1}}{\text{jumlah keluhan/aduan n-1}} \times 100\%$
		3	Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja pelayanan masyarakat bidang Pekerjaan umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Inspektorat Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Inspektorat Kota	$\frac{\text{Jumlah keluhan/Aduan pada tahun n} - \text{jumlah keluhan/aduan n-1}}{\text{jumlah keluhan/aduan n-1}} \times 100\%$
23	Terwujudnya peraturan daerah dan peraturan pelaksana yang memenuhi azas hukum yang berlaku	1	Persentase penurunan kasus/ tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	$\frac{\text{Jumlah Kasus/ tuntutan pada tahun n} - \text{jumlah kasus/tuntutan pada tahun n-1}}{\text{jumlah kasus/tuntutan pada tahun n-1}} \times 100\%$
		2	Persentase penurunan jumlah regulasi daerah yang dibatalkan atau dicabut	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	$\frac{\text{Jumlah regulasi dibatalkan pada tahun n} - \text{jumlah regulasi dibatalkan pada tahun n-1}}{\text{jumlah regulasi dibatalkan pada tahun n-1}} \times 100\%$

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

